

WEBINAR



Prospek Ekonomi Biru Bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia

26 September 2022

TIM RISET KOLABORASI

Laboratorium Indonesia 2045
PKSPL - Institut Pertanian Bogor
SDGs Center - Universitas Diponegoro

TIM RISET KOLABORASI



Laboratorium Indonesia 2045



Drs. Makmur Keliat, Ph.D.
(Ketua Peneliti)

Anggota Peneliti :
M. Riza Damanik, Ph.D.
Reyhan Noor, S.E
Indah Lestari, S.IP
Raffandi Marzuki
Rionanda Dhamma Putra

PKSPL Institut Pertanian Bogor



Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si
(Ketua Peneliti)

Anggota Peneliti :
Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.
Umi Muawanah, Ph.D.
Fony Farizal, M.Si

SDGs Center Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto
(Ketua Peneliti)

Peneliti :
Dessy Ariyanti, S.T., M.T., Ph.D.
Elinna Putri Handayani, S.Si
Dina Lesdantina, ST., M.T.

URGENSI EKONOMI BIRU BAGI INDONESIA



17.508 Pulau

2,55 juta km²

Zona Ekonomi
Eksklusif



3.257.357 km²

luas wilayah laut

99.083 km

Garis pantai



RPJMN 2020-2024

pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi termasuk pengelolaan kelautan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry dan kemaritiman

Perpres No 34 Tahun 2022

tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, pemerintah telah menetapkan cetak biru kebijakan kelautan Indonesia 2021-2025 yang berbasis pada konsep ekonomi biru

PDB Perikanan Triwulan IV 2021

hanya Rp126 triliun atau 2,83% terhadap nilai PDB nasional

TANTANGAN EKONOMI BIRU DI MASA DEPAN



FOKUS KAJIAN

1. Sektor apa saja yang perlu menjadi prioritas dalam mengoptimalkan potensi ekonomi biru, termasuk investasi swasta, sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Desain kelembagaan seperti apa yang ideal untuk mengkoordinasikan sektor-sektor ekonomi biru.
3. Bagaimana evaluasi regulasi terkait pengelolaan ekonomi biru yang sudah ada; dan,
4. Inovasi dan teknologi apa yang diproyeksikan krusial dalam mengelola ekonomi biru.

pola pengelolaan sumber daya

regulasi dan desain kelembagaan yang belum sesuai

efek berkepanjangan dari disrupsi Pandemi Covid-19



Sektor apa saja yang perlu menjadi prioritas dalam mengoptimalkan potensi ekonomi biru, termasuk investasi swasta, sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

PROYEKSI SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU 2022-2045



merujuk pada:

- Blue Economy Development Index (BEDI) yang dirilis oleh Archipelagic & Island States, 2021
- Blue Economy Development Framework yang dirilis oleh Bappenas dan OECD, 2021

BEDI	Blue Economy Development Framework
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sustainable use marine living resources;</i> 2. <i>Sustainable use of marine non-living resources;</i> 3. <i>Sustainable non-extractive use of marine systems;</i> 4. <i>Sustainable marine trade and commerce; dan</i> 5. <i>Marine conservations and climate regulations.</i> 	<p><i>Established sectors:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capture fisheries and seafood processing;</i> 2. <i>Shipping and ports;</i> 3. <i>Shipbuilding and repair;</i> 4. <i>Offshore oil and gas (shallow water);</i> 5. <i>Marine manufacturing and construction;</i> 6. <i>Maritime and coastal tourism;</i> 7. <i>Marine business services;</i> 8. <i>Marine research and development and education; dan</i> 9. <i>Dredging</i> <hr/> <p><i>Emerging sectors:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Marine aquaculture;</i> 2. <i>Deep water and ultra-deep water oil and gas;</i> 3. <i>Offshore wind energy;</i> 4. <i>Ocean renewable energy;</i> 5. <i>Marine and seabed mining;</i> 6. <i>Maritime safety and surveillance;</i> 7. <i>Marine biotechnology;</i> 8. <i>High-tech products and services.</i>



Menetapkan skala prioritas implementasi sektor:

- jangka pendek (2022-2024),
- jangka menengah (2024-2029)
- jangka panjang (2029-2045)

Parameter:

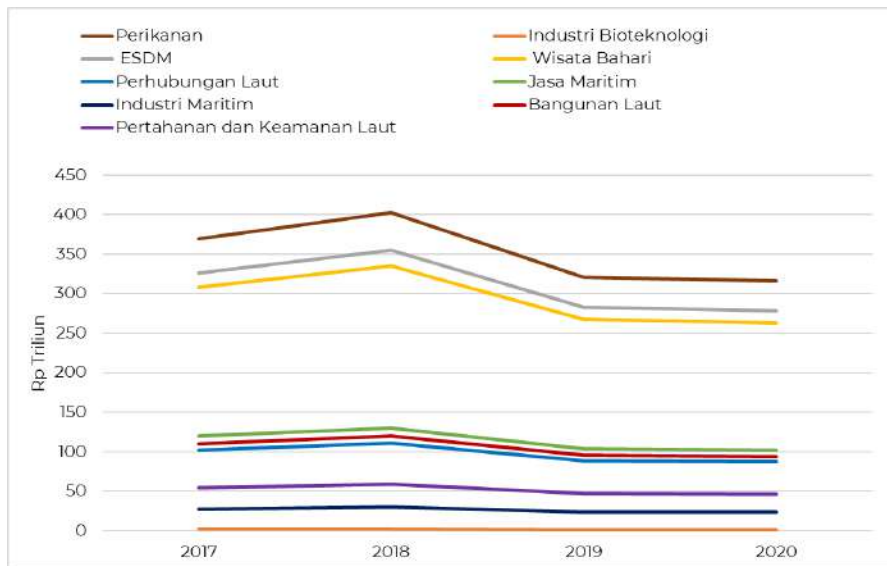
- potensi dan kontribusi ekonomi,
- kesempatan kerja yang berhasil diciptakan
- kebutuhan investasi masing-masing sektor

PROYEKSI SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU 2022-2045

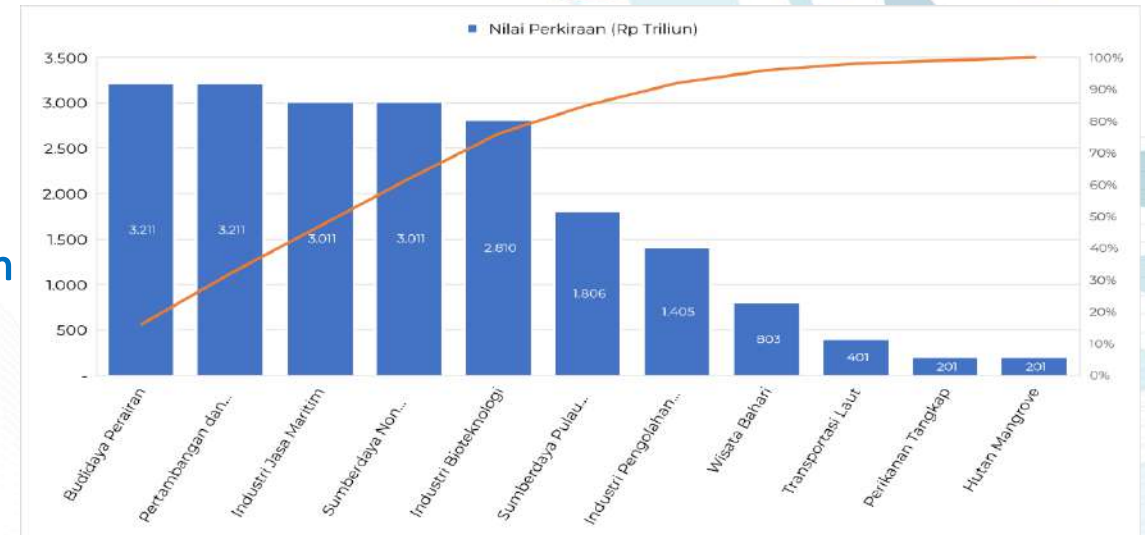
Parameter Potensi Dan Kontribusi Ekonomi

tiga sektor yang secara konsisten memberikan kontribusi paling besar, **perikanan, ESDM, dan wisata bahari** sementara sektor dengan potensi tinggi (BPS) **budidaya perairan; pertambangan dan energi dan industri jasa maritim**

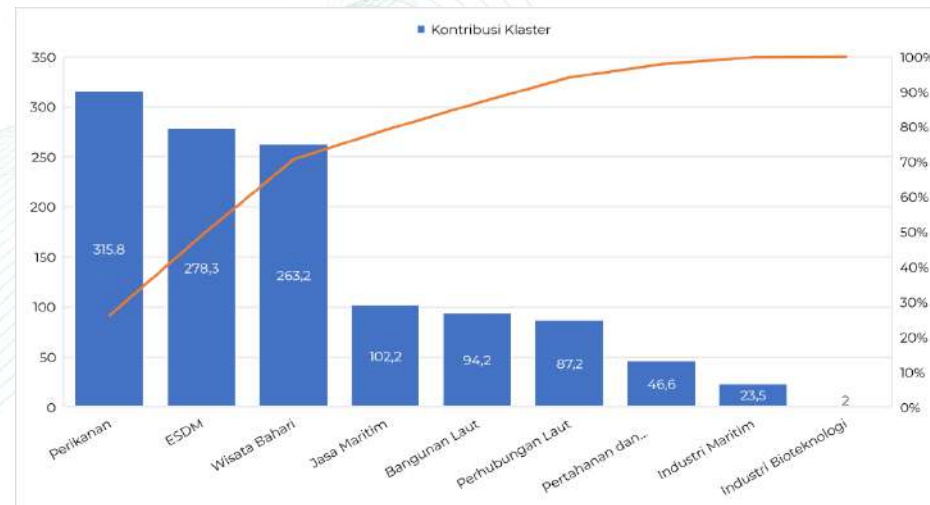
Kontribusi Kluster Pembentuk PDB Kemaritim 2017-2020



Potensi Ekonomi Biru Indonesia



Kontribusi Ekonomi Biru terhadap PDB 2021

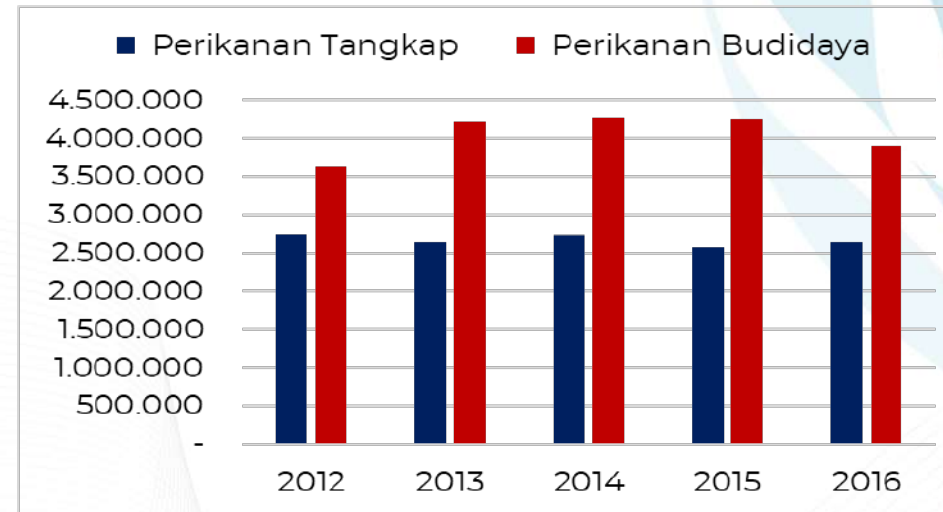


PROYEKSI SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU 2022-2045

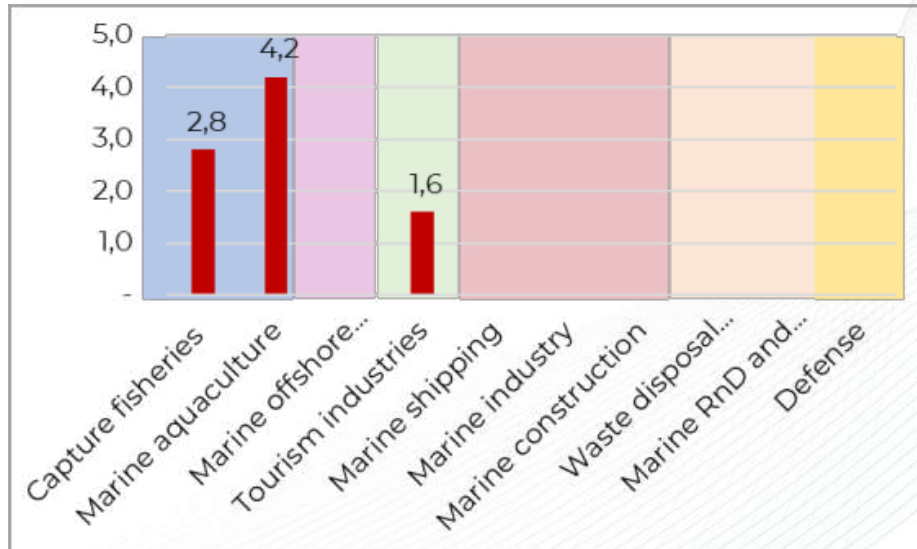


Parameter Ketenagakerjaan

tiga sektor yang secara konsisten menyerap tenaga kerja paling besar, **perikanan tangkap**, **perikanan budidaya** dan **wisata**



Jumlah Nelayan Berdasarkan Subsektor



	<i>Sustainable use of marine living resources</i>
	<i>Sustainable use of marine non-living resources</i>
	<i>Sustainable non-extractive use of marine systems</i>
	<i>Sustainable marine trade and commerce</i>
	<i>Marine conservations and climate regulations</i>
	<i>Defense</i>

Serapan Ketenagakerjaan Sektor Ekonomi Biru

PROYEKSI SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU 2022-2045



Parameter Realisasi dan Kebutuhan Investasi

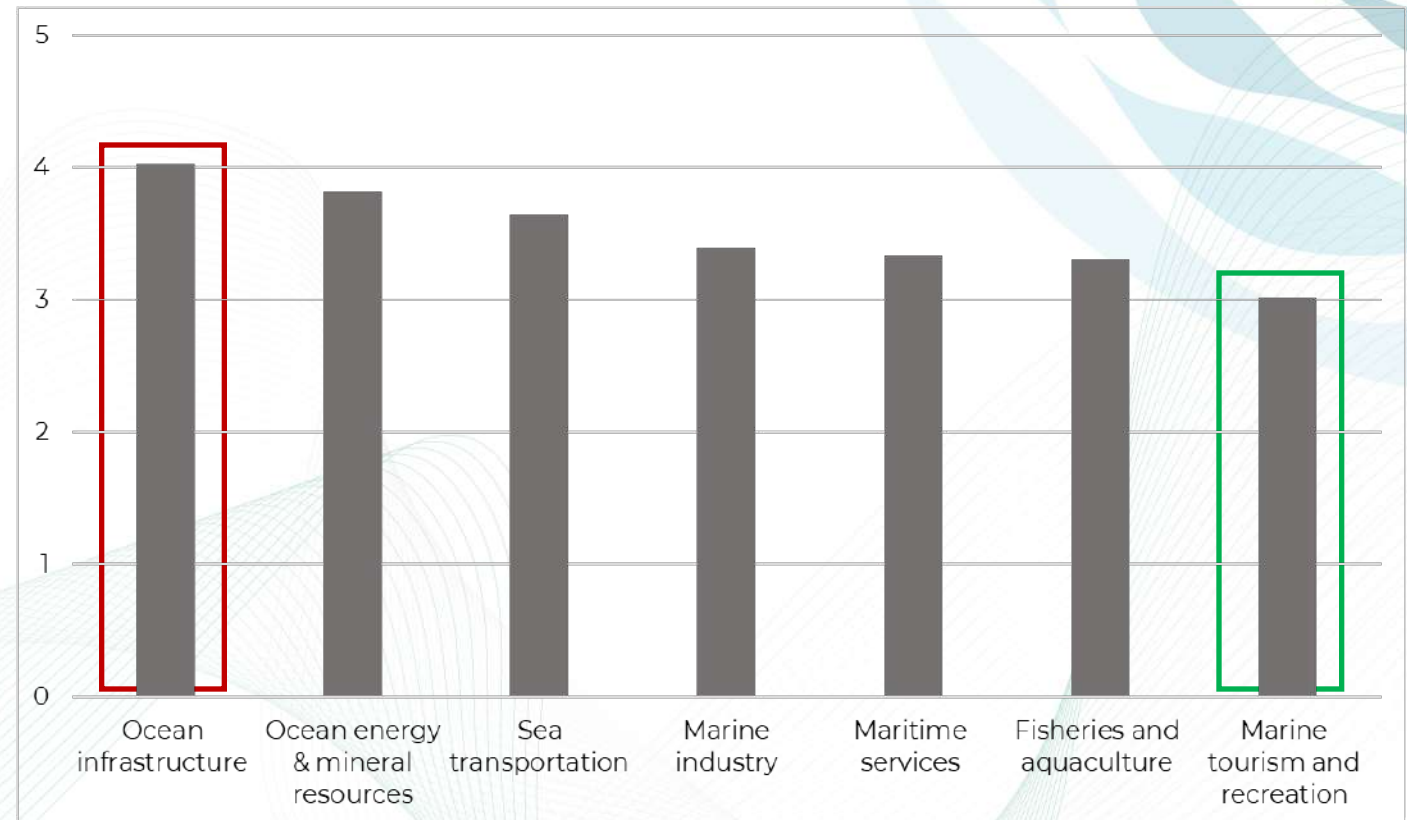
Incremental Capital Outflow Ration (ICOR) sebagai nilai yang menunjukkan besaran tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output.



marine tourism and recreation serta *fisheries and aquaculture* memiliki ICOR paling rendah (investasi paling rendah)



sektor prioritas jangka pendek (2022-2024)



ICOR Sektor Kelautan dan Perikanan 2015

PROYEKSI SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU 2022-2045



Sektor (Subsektor)	2022-2024	2024-2029	2029-2045
<i>Marine Living Resources</i>			
Capture Fisheries	Red	Red	Red
Mariculture	Red	Red	Red
Marine Biotechnology	White	Green	Orange
Marine Based Food	Red	Red	Red
<i>Marine Non-Living Resources</i>			
Renewable Energy	Green	Orange	Red
<i>Non-Extractive Use of Marine Systems</i>			
Coastal Tourism	Red	Red	Red
Recreational Tourism	Red	Red	Red
<i>Sustainable Marine Trade and Commerce</i>			
Ship Building	Green	Orange	Red
Port-Shipping	Green	Orange	Red
Logistic	Green	Orange	Red
<i>Marine Conservations</i>			
Research, Education, and Innovations	White	Green	Orange
Managing Coastal Area	Green	Orange	Red
Managing Small Islands	Green	Orange	Red
Managing Outer Islands	Green	Orange	Red
Blue Carbon Trade	Green	Orange	Red
<i>Emerging Future Sector</i>			
Water Desalination	Green	Orange	Red
Marine Based Chemical	Green	Orange	Red
Salt	Green	Orange	Red

Prioritas 1 (2022-2024)

- ❑ sektor yang memiliki faktor pemungkin yang lengkap dan sudah dikembangkan sumber daya, investasi, serta inovasi dan teknologi memerlukan afirmasi lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan dukungan kelembagaan
- ❑ **Optimalisasi sektor:** *Capture Fisheries, Mariculture, Marine based Food, Coastal Tourism, Recreational Tourism*

Prioritas 2 (2024-2029)

- ❑ yang telah memiliki faktor pemungkin berupa sumber daya serta inovasi dan teknologi yang sudah dikembangkan namun masih memerlukan sokongan investasi dalam jumlah yang besar untuk pengembangan lebih lanjut
- ❑ **Optimalisasi sektor:** *Capture Fisheries, Mariculture, Marine based Food, Coastal Tourism, Recreational Tourism*
- ❑ **Pengembangan sektor:** *Renewable Energy, Ship Building, Port Shipping Logistic, Marine Conservation and Emerging Future Sector (Water Desalination, MBC, Salt)*

Prioritas 3 (2029-2045)

- ❑ kebutuhan yang masih tinggi atas dua faktor pemungkin untuk dikembangkan, yakni investasi dan teknologi
- ❑ **Optimalisasi hampir semua sektor**
- ❑ **Pengembangan sektor:** *Marine Biotechnology and R&D on Marine Conservation*

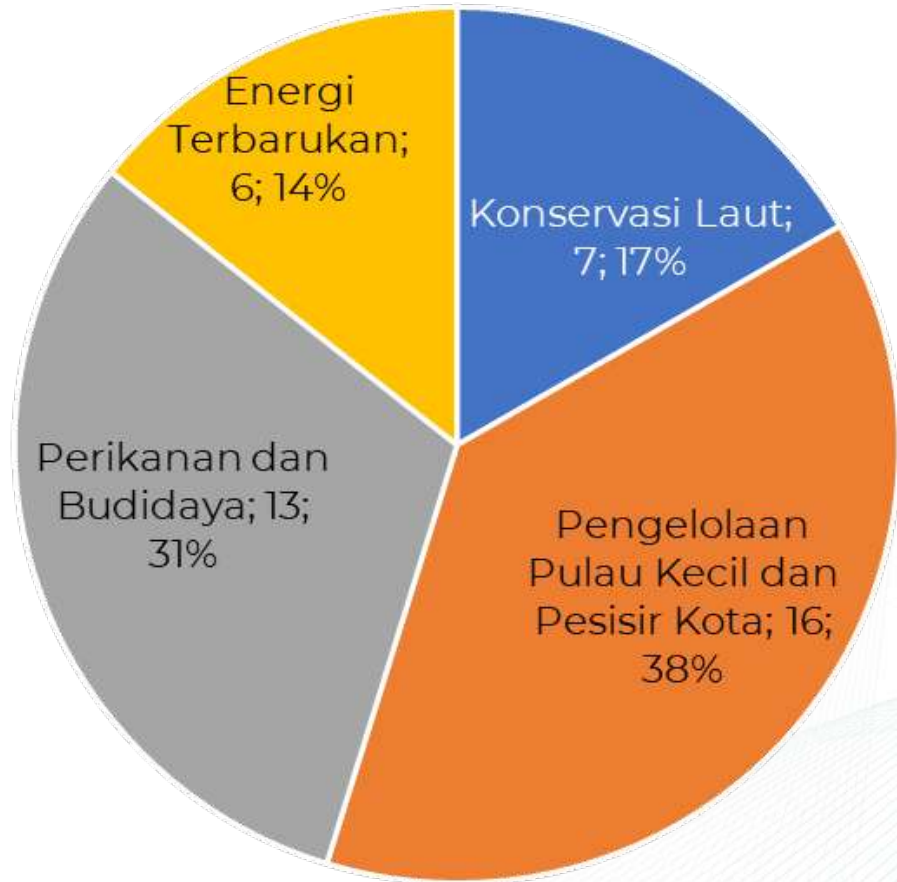
Keterangan	
Green	Belum dikembangkan
Orange	Mulai dikembangkan
Red	Sudah dikembangkan
White	Keadaan saat ini



Desain kelembagaan seperti apa yang ideal untuk mengkoordinasikan sektor-sektor ekonomi biru?

DESAIN KELEMBAGAAN

PEMETAAN LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA



Jumlah Lembaga yang Mengatur Sektor-Sektor Ekonomi Biru di Indonesia

Di Indonesia, **tidak terdapat Lembaga yang secara eksplisit dibentuk dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekonomi biru**. Namun terdapat beberapa kementerian yang mengelola sektor-sektor yang termasuk sektor ekonomi biru dan memiliki peran dan kompetensi yang mendukung pengelolaan sektor-sektor ekonomi biru

DESAIN KELEMBAGAAN

PEMETAAN LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA



Kementerian/Badan	Kompetensi	Sektor Ekonomi Biru				Korelasi
		Konservasi Laut	Pengelolaan Pulau Kecil dan Pesisir Kota	Perikanan dan Budidaya	Energi Terbarukan	
Kementerian Koordinator Bidang dan Investasi	Melakukan koordinasi antar kementerian	✓	✓	✓	✓	Langsung
Statistik Indonesia	Pengembangan kerangka kerja akuntansi laut	✓	✓	✓	✓	Tidak langsung
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Koperasi dan UKM di bidang kelautan/perikanan		✓	✓		Tidak langsung
Kementerian Pertahanan	Pertahanan Militer (Angkatan laut) dan Menyusun Kebijakan tentang pertahanan laut		✓			Tidak langsung
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Minyak dan gas lepas pantai, serta Pengembangan energi laut				✓	Tidak langsung
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Konservasi laut (beberapa kawasan lindung laut), mengurangi polusi laut dan pelestarian ekosistem mangrove	✓	✓			Tidak langsung
Kementerian Keuangan	Bea dan Cukai dari industri perkapalan, biaya dan pajak, subsidi, serta menyusun mekanisme terkait karbon		✓	✓		Tidak langsung
Kementerian Luar Negeri	Melindungi dan memajukan kepentingan maritim Indonesia di dunia Internasional	✓	✓	✓	✓	Tidak langsung
Kementerian Dalam Negeri	Mengawasi Batas negara (provinsi dan wilayah/ kota madya), dan melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota di bidang kelautan		✓			Tidak langsung
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait kelautan	✓	✓	✓		Tidak langsung

DESAIN KELEMBAGAAN

PEMETAAN LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA

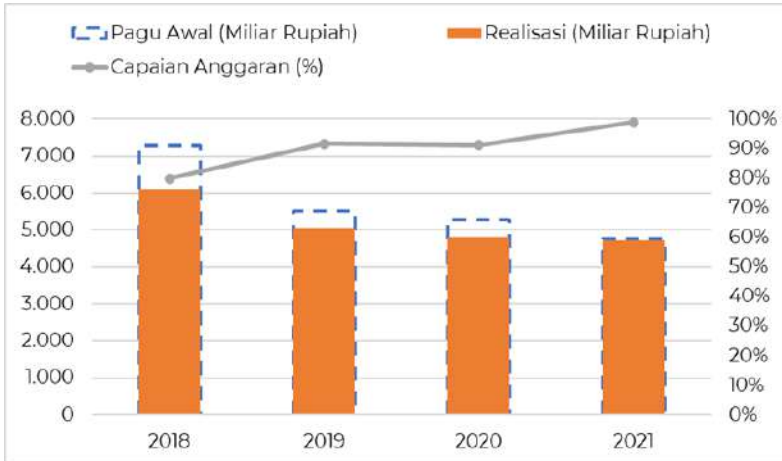


Kementerian / Badan	Kompetensi	Sektor Ekonomi Biru				Korelasi
		Konservasi Laut	Pengelolaan Pulau Kecil dan Pesisir Kota	Perikanan dan Budidaya	Energi Terbarukan	
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perikanan, akuakultur, Pengawasan sumber daya perikanan, pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi laut, Layanan bidang kelautan, dan nilai tambah produk kelautan/perikanan	√	√	√	√	Langsung
BAPPENAS	Orientasi strategis untuk investasi, Pembangunan dan perencanaan jangka menengah dan panjang (RPJMN dan RPJPN), dan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon		√	√		Tidak langsung
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengelolaan Wisata bahari		√			Langsung
Kementerian Perhubungan	Ekspor-Import, navigasi, pengelolaan Pelabuhan, penjagaan wilayah laut dan pantai, serta titik focus International Maritime Organization (IMO)		√	√		Langsung
Kementerian Industri	Industri pengolahan, Industri Pembuatan Kapal, industri kecil dan menengah kelautan/perikanan, Standarisasi dan sertifikasi produk		√	√		Tidak langsung
Kementerian Perdagangan	Diplomasi perdagangan, termasuk negosiasi hambatan tarif dan non-tarif untuk ekspor produk perikanan, promosi perdagangan, terutama untuk produk ekspor, standarisasi dan sertifikasi produk, serta perlindungan konsumen		√	√		Tidak langsung
BRIN	Melaksanakan penelitian tentang kelautan, dan R&D yang berlaku di industri	√	√	√	√	Tidak langsung
Badan Standardisasi Nasional	Standarisasi produk dan proses			√		Tidak langsung

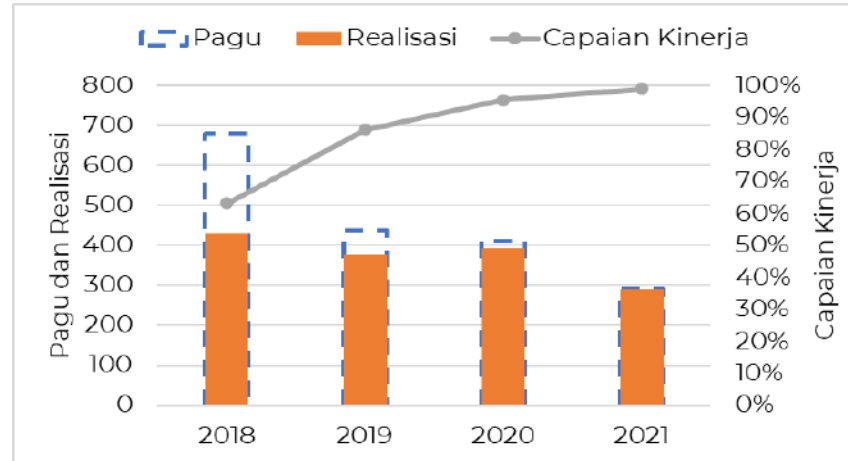
DESAIN KELEMBAGAAN

EFEKTIFITAS LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA

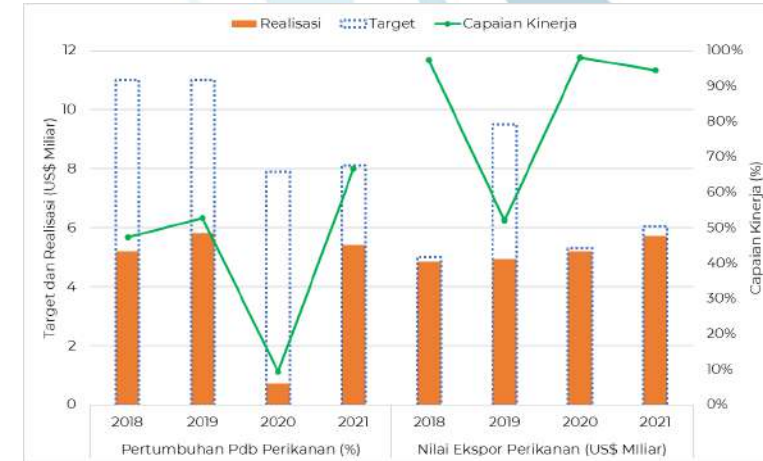
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Miliar Rupiah), 2018-2021



Pagu dan Realisasi Sektor Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir Kota (Miliar Rupiah), 2018-2021



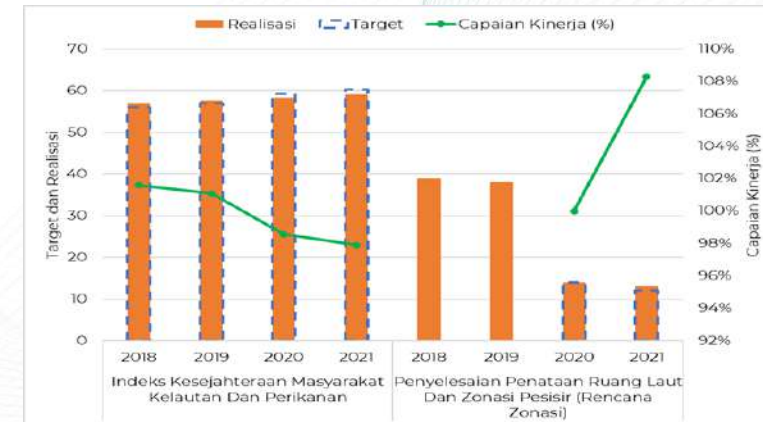
Target dan Realisasi Sektor Perikanan dan Budidaya (Miliar AS\$), 2018-2021



Pagu dan Realisasi Sektor Konservasi Laut (Miliar Rupiah), 2018-2021



Target dan Realisasi Sektor Konservasi Laut (Juta Hektare), 2018-2021

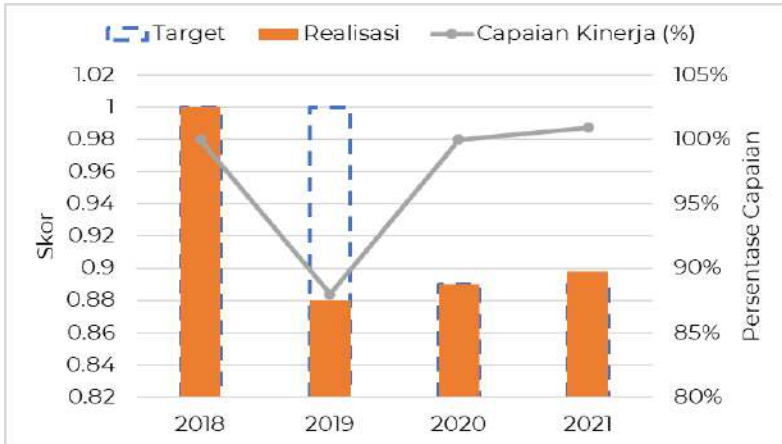


Target dan Realisasi Sektor Pengelolaan Pulau Kecil dan Pesisir Kota, 2018-2021

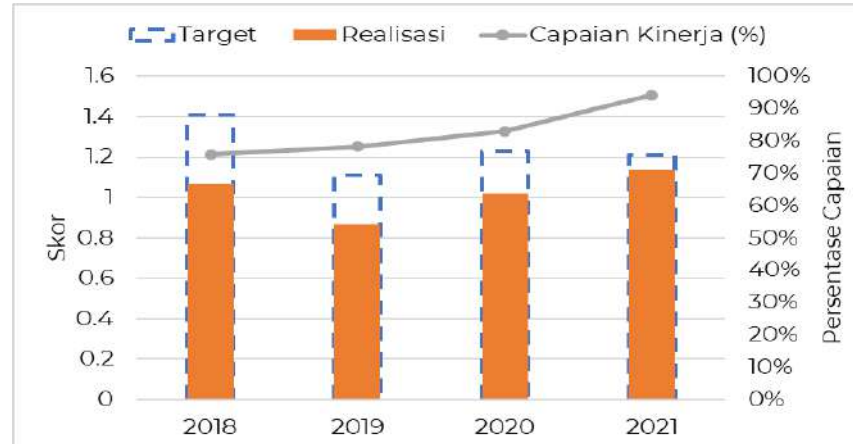
DESAIN KELEMBAGAAN

EFEKTIFITAS LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA

Kementerian Perhubungan



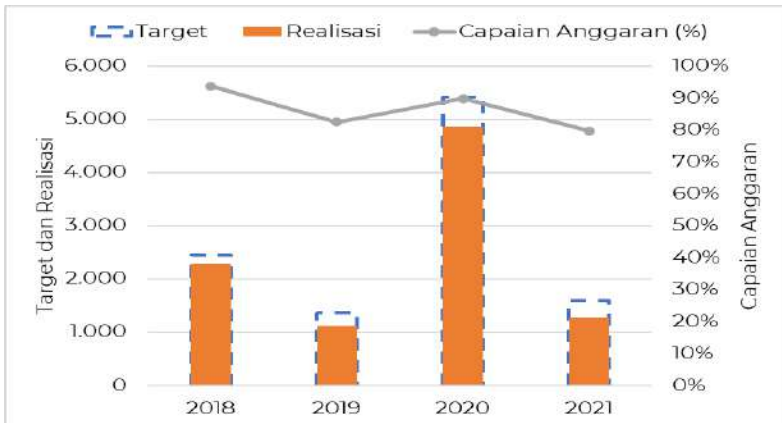
Capaian Rasio "Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut", 2018- 2021



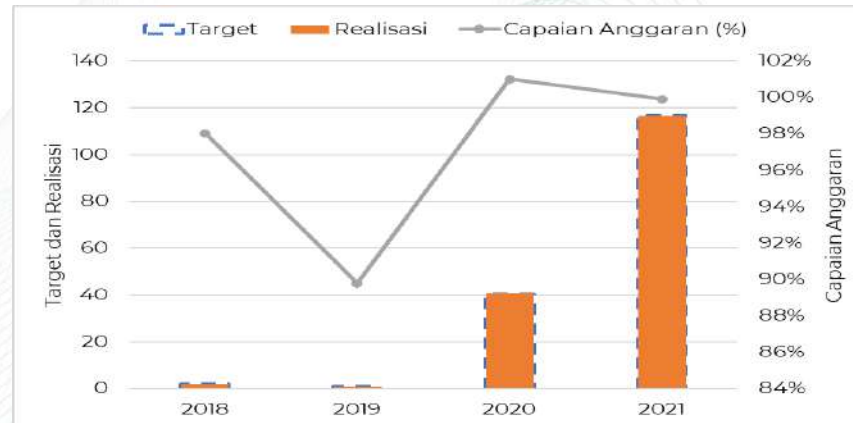
Capaian Rasio "Meningkatnya Keselamatan Transportasi", 2018-2021



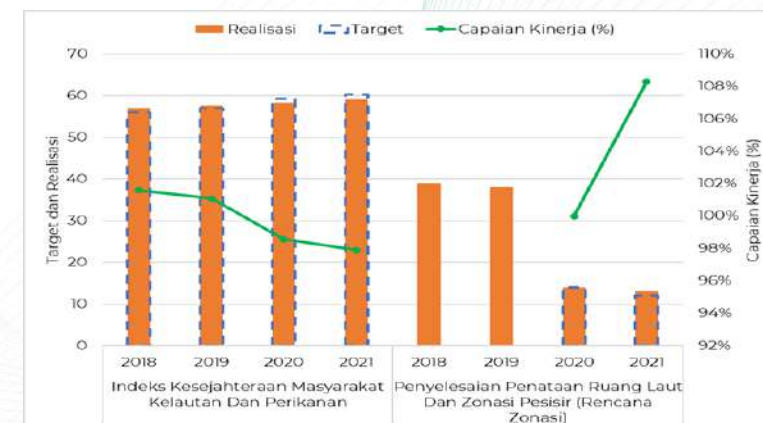
Capaian Rasio "On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Laut", 2018-2021



Capaian Anggaran "Terwujudnya Konektivitas Transportasi Laut" (Juta Rupiah), 2018-2021



Capaian Anggaran "Meningkatnya Keselamatan Transportasi" (Miliar Rupiah), 2018-2021



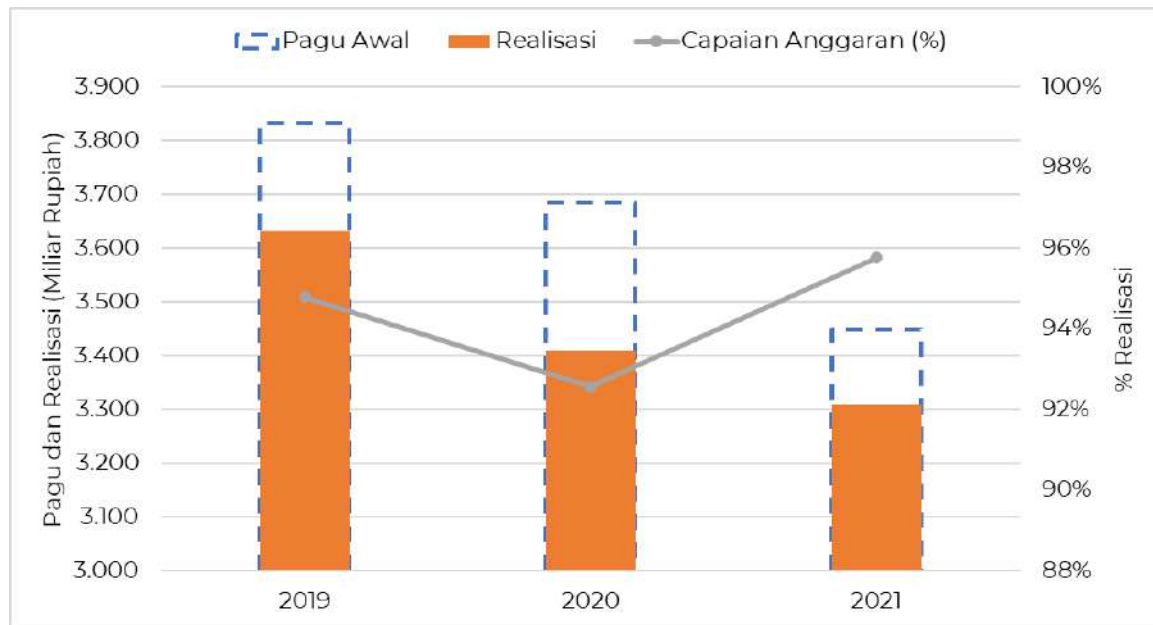
Capaian Anggaran (OTP) Layanan Transportasi Laut" (Miliar Rupiah), 2018-2021

DESAIN KELEMBAGAAN

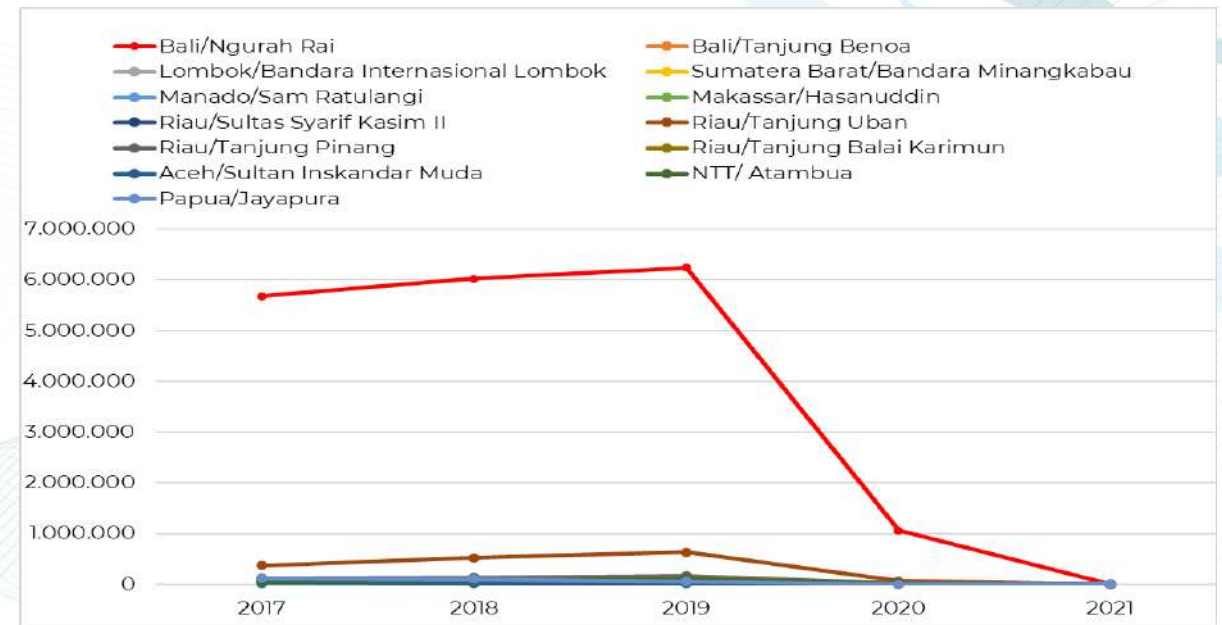
EFEKTIFITAS LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Capaian Anggaran Kemenparekraf (Miliar Rupiah), 2019-2021

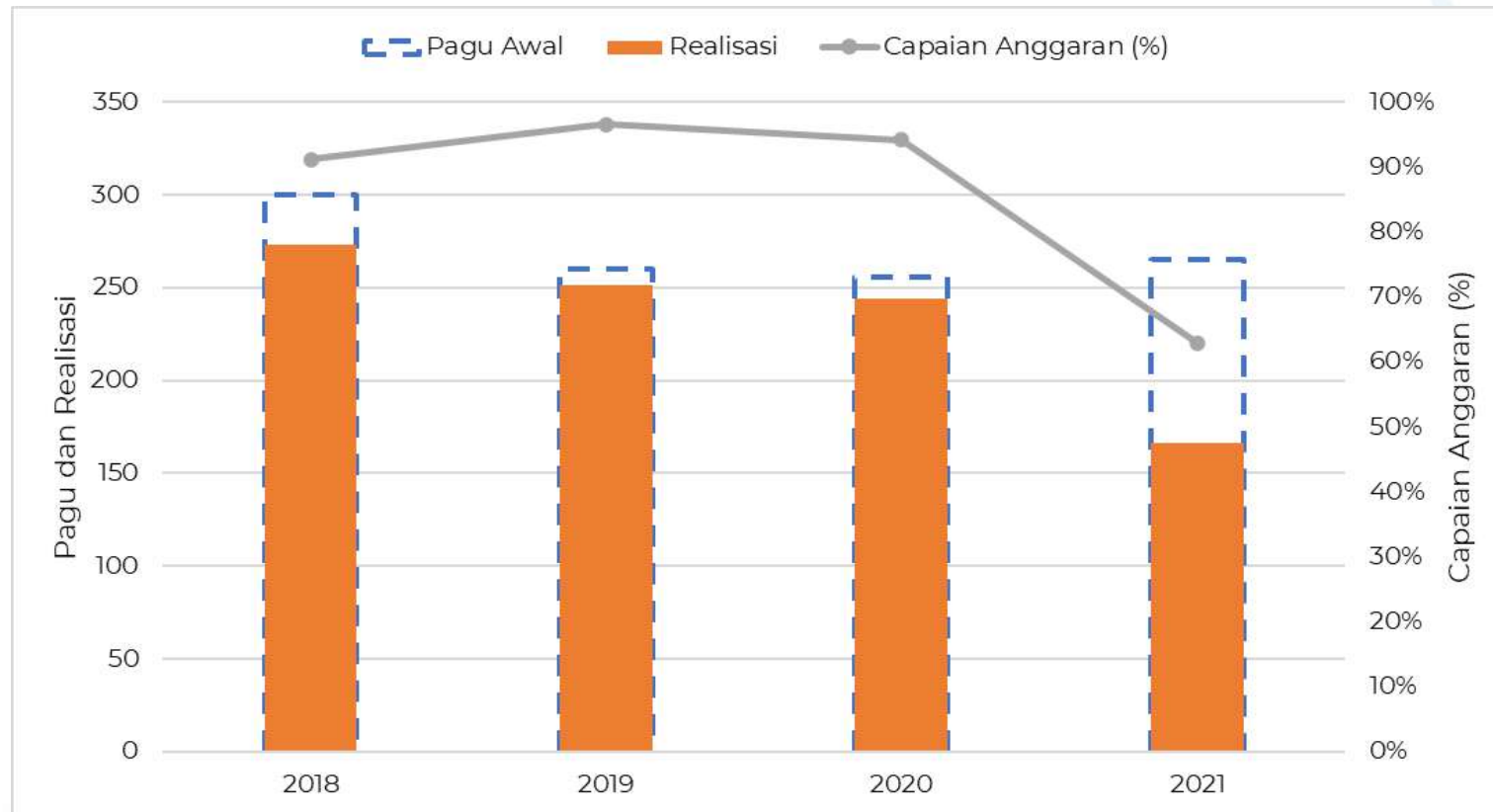


Total Wisatawan Mancanegara, 2017-2021

DESAIN KELEMBAGAAN

EFEKTIFITAS LEMBAGA TERKAIT PENGELOLAAN EKONOMI BIRU INDONESIA

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Capaian Anggaran Kemenkomarves (Miliar Rupiah), 2018-2021

DESAIN KELEMBAGAAN

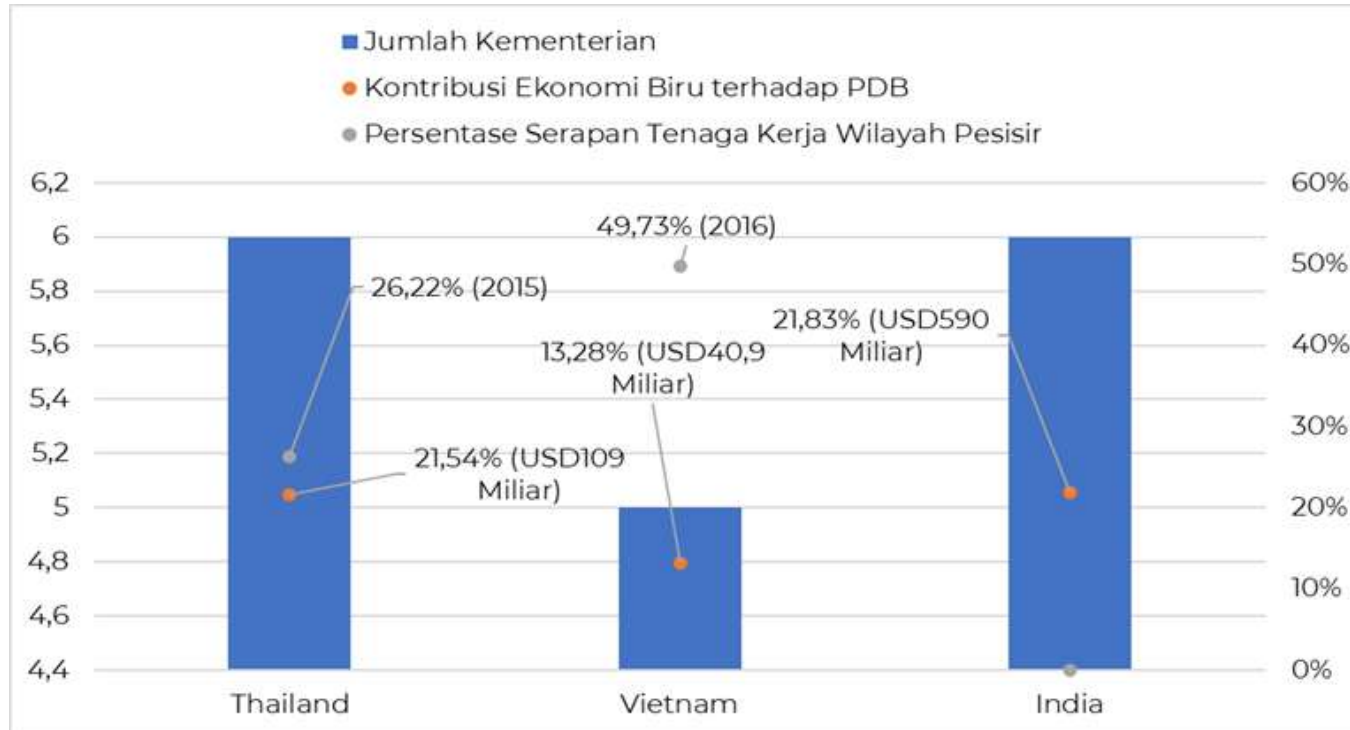
STUDI KOMPARATIF KELEMBAGAAN EKONOMI BIRU



No	Uraian	Indonesia	Thailand	Vietnam	India
1	Luas Wilayah	5.193.250 km ²	513.121 km ²	331.212 km ²	3.287.590 km ²
2	Luas Wilayah Laut	3.273.810 km ²	2.230 km ²	21.131 km ²	315.609 km ²
3	Panjang Garis Pantai	99.083 km	3.148 km	3.260 km	7.516 km
4	Jumlah Penduduk	273 juta	66,2 juta	95,5 juta	1,38 miliar
5	GDP (2021)	USD 1.186 Miliar	USD 505 Miliar	USD 362 Miliar	USD 3.173 Miliar
6	GDP (2018)	USD 1.146 Miliar	USD 506 Miliar	USD 308 Miliar	USD 2.702 Miliar
7	Tahun Merdeka	1945	-	1945	1947
8	Jenis Pemerintahan	Republik konstitusional	Monarki konstitusional	Republik konstitusional	Republik konstitusional
9	%Kontribusi Ekonomi Biru terhadap PDB (2018)	16,% (USD 188 Miliar)	21,54% (USD 109 Miliar)	13,28% (USD 40,9 Miliar)	21,8% (USD 590 Miliar)

DESAIN KELEMBAGAAN

STUDI KOMPARATIF KELEMBAGAAN EKONOMI BIRU



Perbandingan struktur kelembagaan dari Thailand, Vietnam dan India:

“struktur kelembagaan yang menyebar dalam hal ini sektor ekonomi biru dikelola di 5-6 kementerian memiliki kekurangan yaitu ketimpangan antara kontribusi secara ekonomi dengan perlindungan ekosistem lautnya”

INDONESIA:

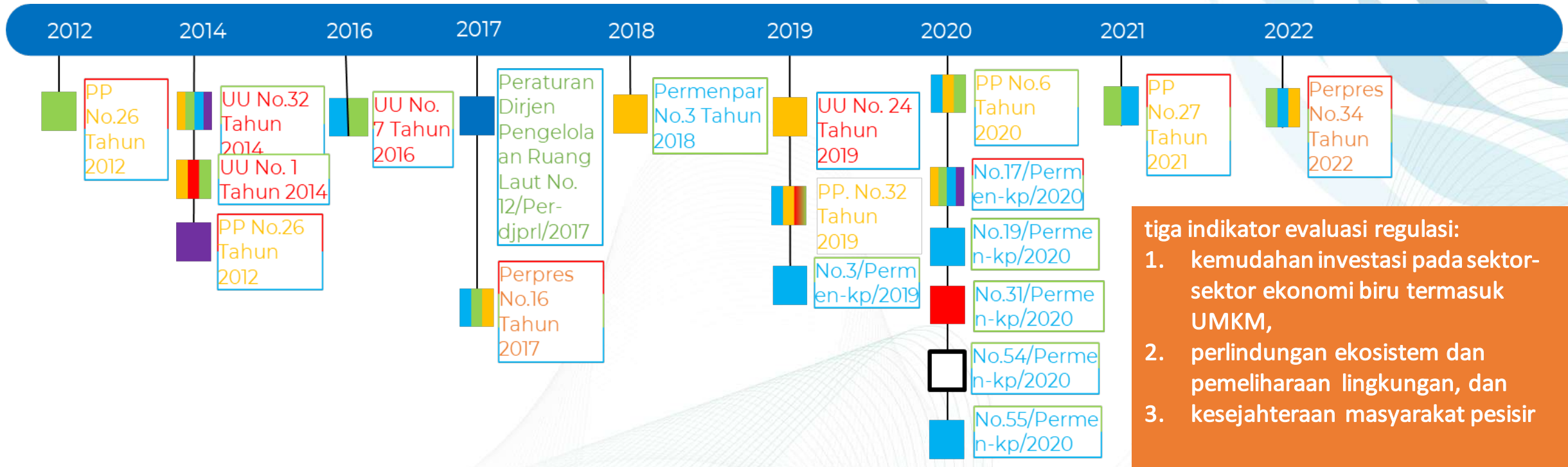
dibutuhkan terobosan struktur Lembaga baru yang dapat mengakomodasi ketiga parameter kesuksesan sektor ekonomi biru yaitu pertumbuhan investasi dan ekonomi makro, perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat



Bagaimana evaluasi regulasi terkait pengelolaan ekonomi biru yang sudah ada?

EVALUASI REGULASI

PEMETAAN INDIKATOR REGULASI SEKTORAL EKONOMI BIRU DI INDONESIA



tiga indikator evaluasi regulasi:

1. kemudahan investasi pada sektor-sektor ekonomi biru termasuk UMKM,
2. perlindungan ekosistem dan pemeliharaan lingkungan, dan
3. kesejahteraan masyarakat pesisir

Keterangan:

■ Perikanan	■ Transportasi laut, pelabuhan, kapal, logistik	■ Pariwisata Laut dan pesisir	■ ESDM	■ Konservasi laut	■ Desalinasi air laut	■ KUR	
UU	PP	Perpres	Permen	Perdirjen	Investasi	Ekosistem	Kesejahteraan

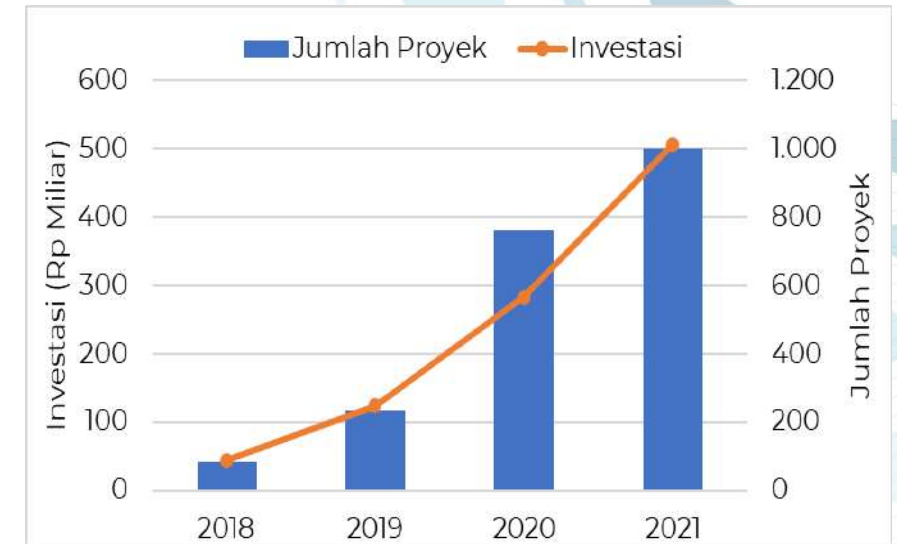
EVALUASI REGULASI

DAMPAK TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI

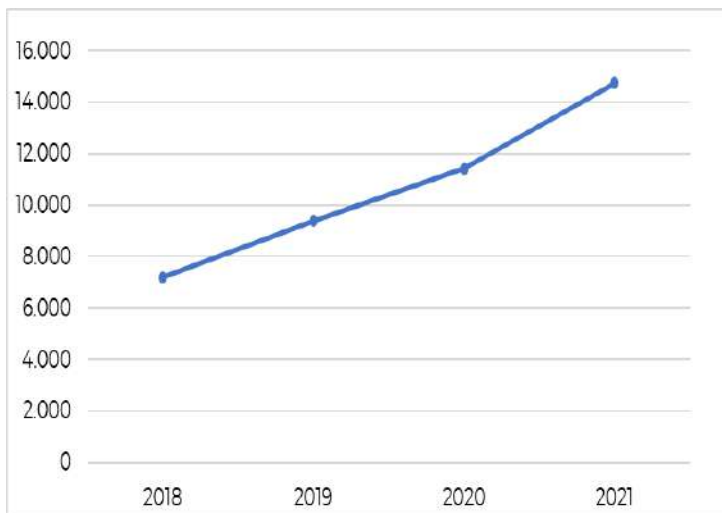


Regulasi dan kebijakan terkait investasi di bidang kelautan dan perikanan:

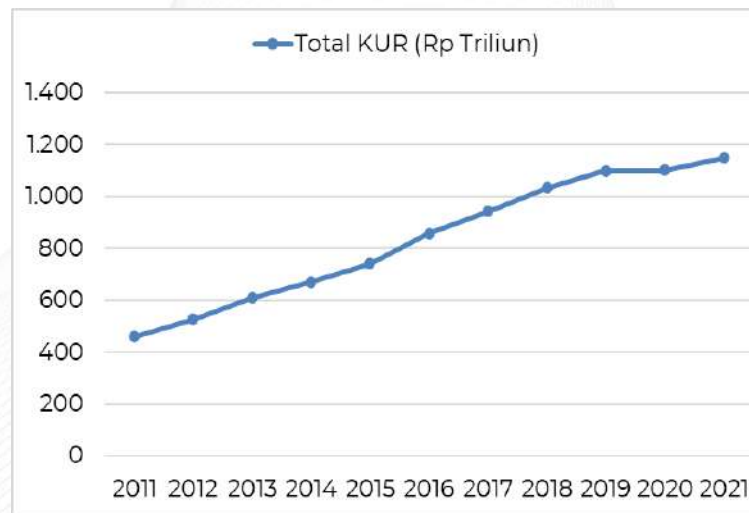
- UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil,
- Perpres Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
- PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan.



Investasi Swasta untuk Ekonomi Biru
2018-2021



Perkembangan Penyaluran Kredit UMK/KUR,
2018-2021



Posisi Kredit UMKM untuk Ekonomi Biru,
2018-2021

jumlah kredit UMKM di bidang Perikanan dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan rata-rata kenaikan 27%

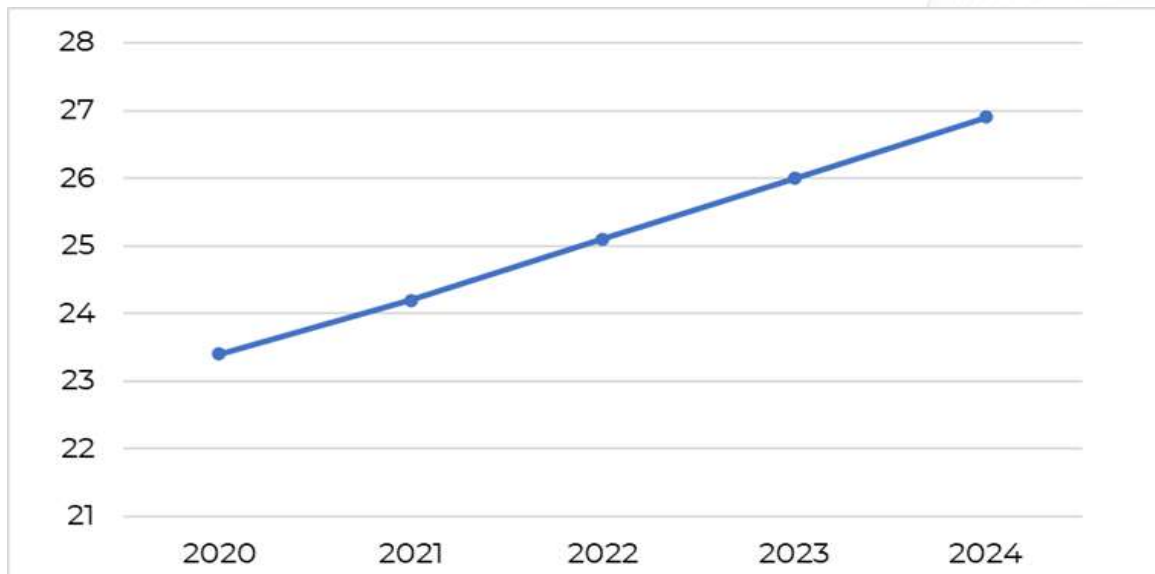
EVALUASI REGULASI

DAMPAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

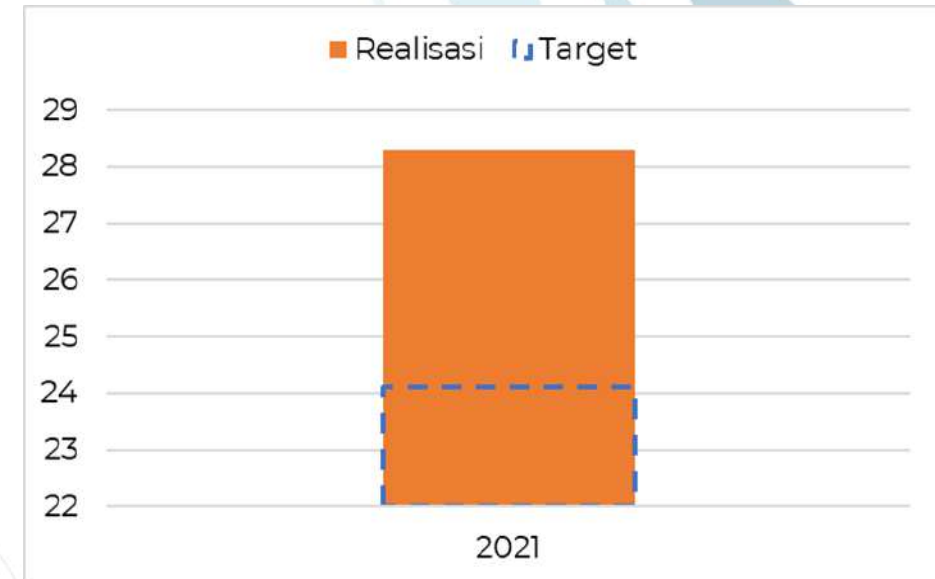


Regulasi dan kebijakan terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan:

- UU No.1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- PP No.32 Tahun 2019 Rencana Tata Ruang dan Laut
- PERMEN-KP No. 31 Tahun 2020 Pengelolaan Kawasan Konservasi
- PP No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Target Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Hektare), 2020-2024



Realisasi dan Target Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Hektare), 2021

Atas implementasi regulasi tersebut, tahun 2021 realisasi luas kawasan konservasi mencapai 28,4 juta hektar, naik 17,79% selama 2020 hingga 2021. Luasan tersebut sudah melampaui target luas kawasan konservasi tahun 2024, alias 117,84% dari target capaian.

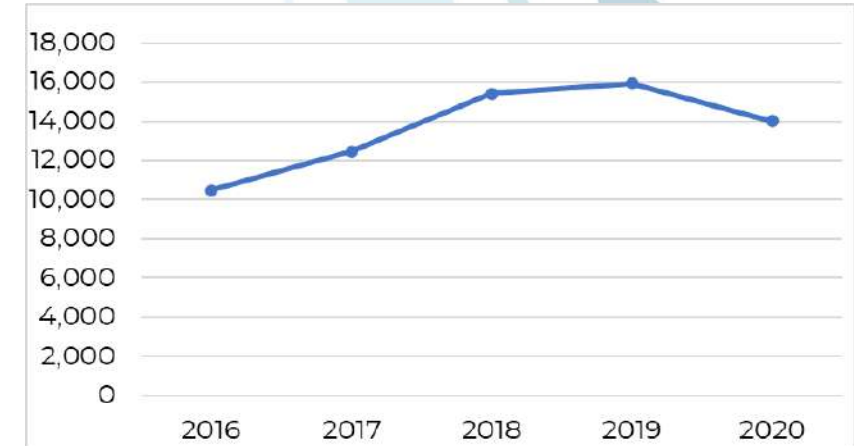
EVALUASI REGULASI

DAMPAK TERHADAP INSENTIF DAN STIMULUS FISKAL SERTA KEUANGAN

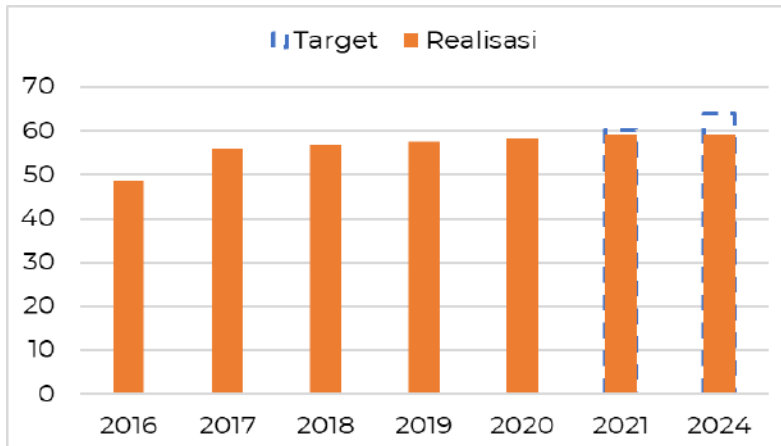


Regulasi dan kebijakan terkait Insentif dan Stimulus Fiskal serta Keuangan:

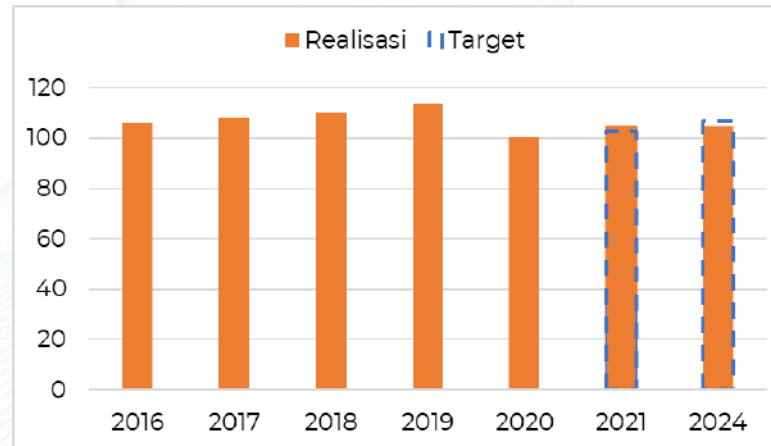
- ❑ UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- ❑ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang menjelaskan bahwa Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakat (IKMKP).



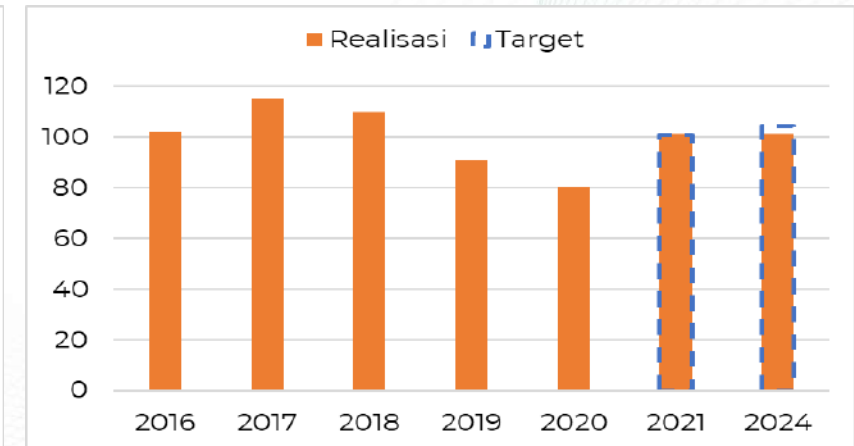
Pembebasan PPN untuk Sektor Kelautan-Perikanan (Miliar Rupiah), 2016-2020



Realisasi dan Target IKMKP, 2016-2021 dan 2024



Realisasi dan Target Nilai Tukar Nelayan (NTN), 2016-2021 dan 2024



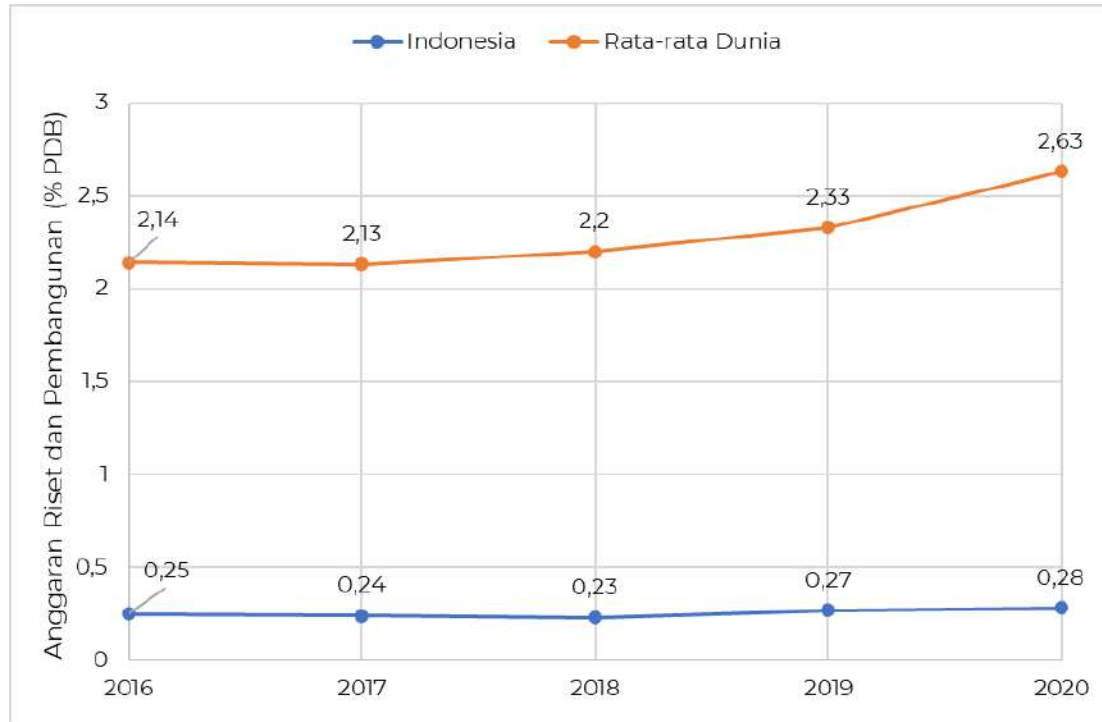
Realisasi dan Target Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), 2016-2021 dan 2024



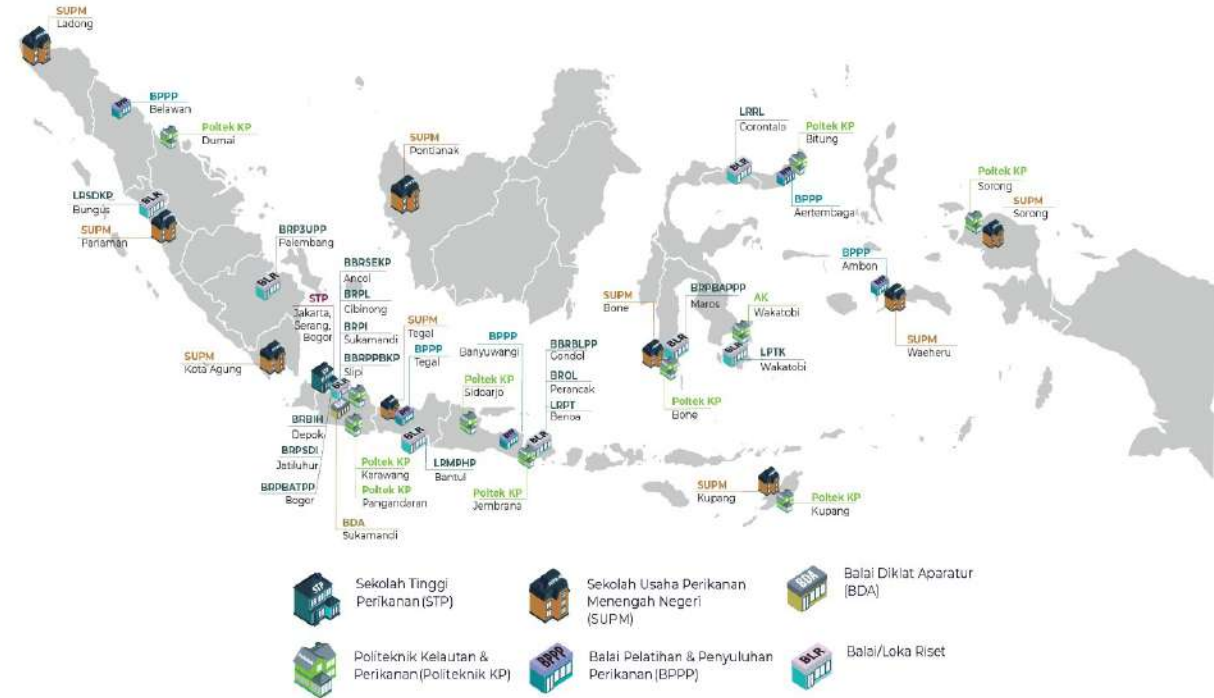
Inovasi dan teknologi apa yang diproyeksikan krusial dalam mengelola ekonomi biru?

ADOPSI TEKNOLOGI DAN INOVASI

PENDANAAN DAN SDM



Anggaran Riset dan Pembangunan Indonesia 2016-2020



Sebaran Kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Tahun 2020

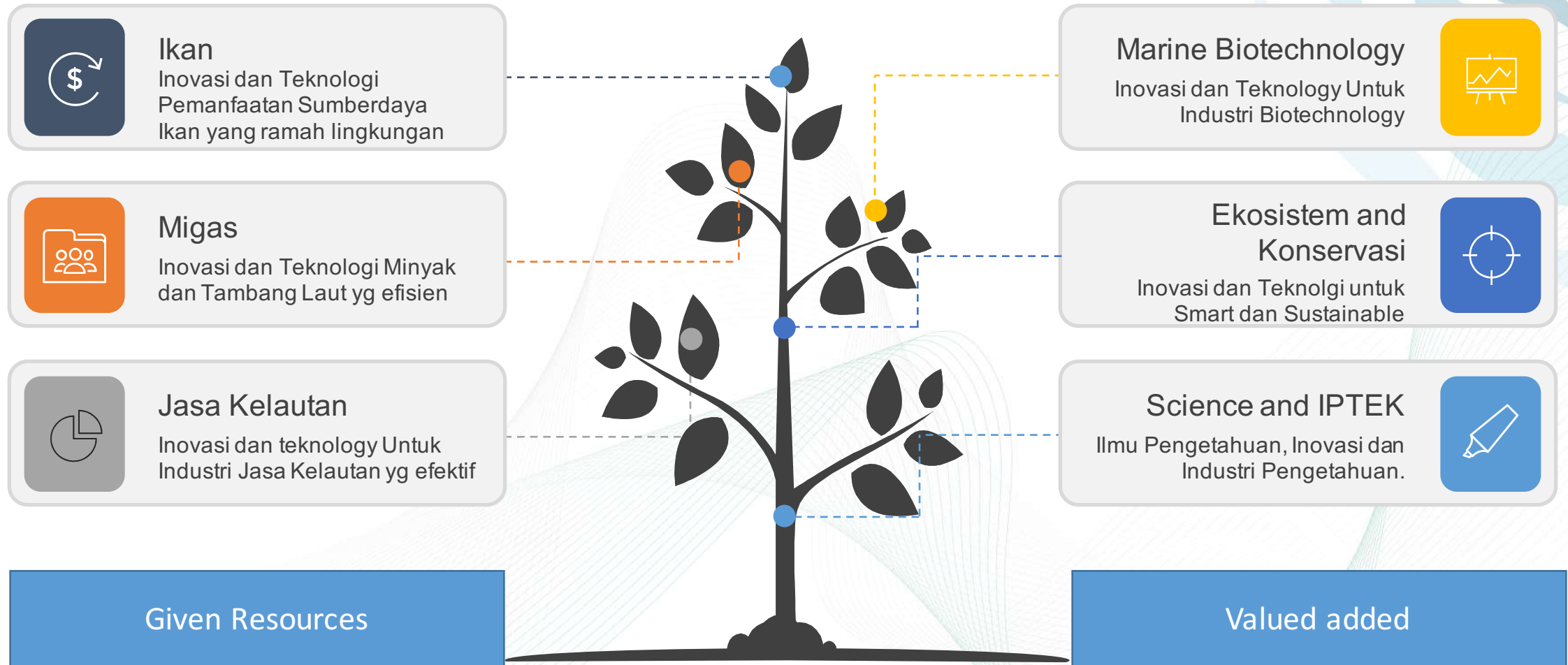
ADOPSI TEKNOLOGI DAN INOVASI

STUDI KOMPARASI DARI NEGARA LAIN



Sektor	Vietnam	Thailand
Perikanan & Akuakultur: Budidaya perikanan pesisir air payau, Mengembangkan industri makanan laut.	<ul style="list-style-type: none"> Lokasinya di daerah pasang surut rendah dan tinggi sekitar 750.000hektar di seluruh 28 provinsipesisir. Industri pengolahan makanan lautmenjadi pengeksport makanan laut terbesar ketiga di dunia (6,9%). Mayoritasnya adalah untuk budidaya udang. Eksport Utama: udang, tuna, gurita dan cumi- cumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Program penyusunan peraturan,audit dan sertifikasi terkait akuakultur. Perencanaan dan pengembangankonservasi perikanan dan habitat terpadu
Energi	<ul style="list-style-type: none"> Energi terbarukan masih dalam tahap penelitian & pengembangan, tetapi dianggap sebagai sumber energi potensial di masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Lingkungan (ISO 14001 dan ISO 18000) serta Pemantauan Merkuri
Wisata pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keanekaragaman hayati di taman nasional dan kawasan lindung; Matahari dan pantai, olahraga air dan menyelam; Tamasya dan relaksasi (resor); mengembangkan kapal pesiar; Wisata warisan; Wisata MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions). 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wisata menyelam berkelanjutan (Green Fins) dan studi kelestarian lingkungan laut dan pantai (Khung Kraben) Pembentukan bank pembibitan lamun (Bor Hin Farmstay) dan wisata rendah karbon (Koh Mak)
Sektor maritim	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan transportasi laut, operasi pelabuhan, industri pembangunan dan perbaikan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pelabuhan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (PSHEMS) Pemetaan Indeks Sensitivitas Lingkungan (ESI) di Proyek Teluk Thailand. Asuransi Transportasi Laut
Lingkungan, Keanekaragaman Hayati & Jasa Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan & Melindungi Ekosistem Mangrove, Ekosistem terumbu karang, Lamun, Laguna, Teluk dan teluk, Mengelola sumber polusi. 	
Sektor-Sektor Berkembang		<ul style="list-style-type: none"> Desalinasi; Energi Alternatif: Ladang Angin; Bioteknologi Kelautan dan Bioprospecting

Transformasi Pembangunan Blue Ekonomi



ADOPSI TEKNOLOGI DAN INOVASI



Artificial Inteligent dan Teknologi

Adopsi teknologi dan inovasi Berbasis kecerdasan buatan untuk efisiensi dan efektivitas

Smart Inovasi dan Teknologi

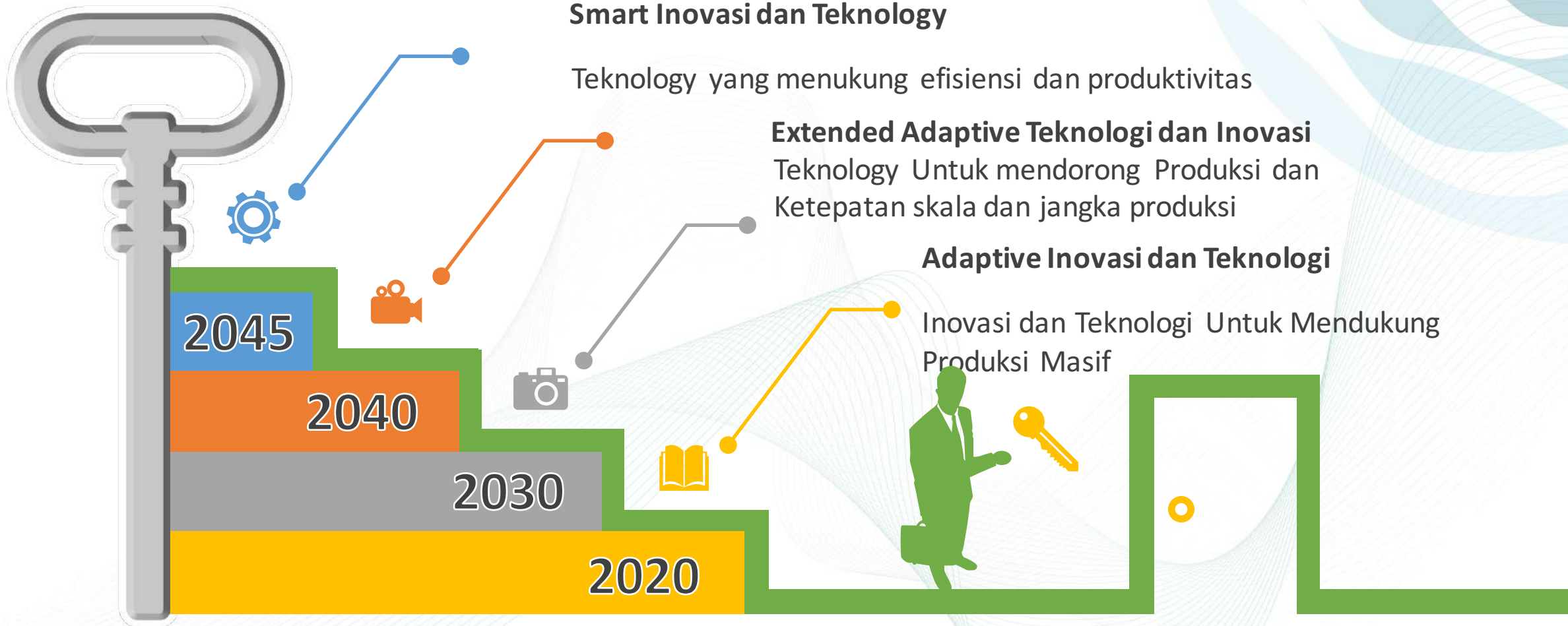
Teknologi yang mendukung efisiensi dan produktivitas

Extended Adaptive Teknologi dan Inovasi

Teknologi Untuk mendorong Produksi dan Ketepatan skala dan jangka produksi

Adaptive Inovasi dan Teknologi

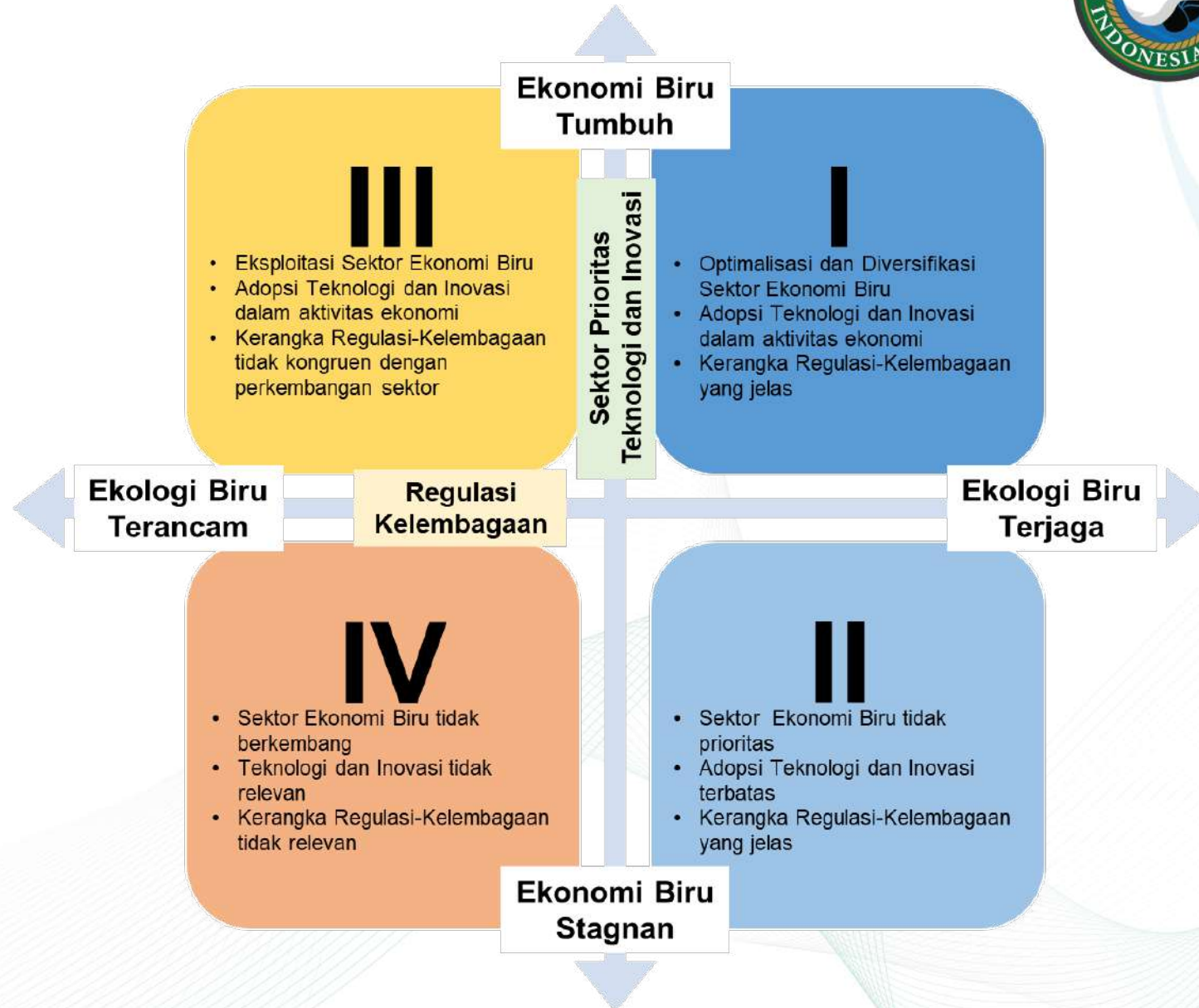
Inovasi dan Teknologi Untuk Mendukung Produksi Masif



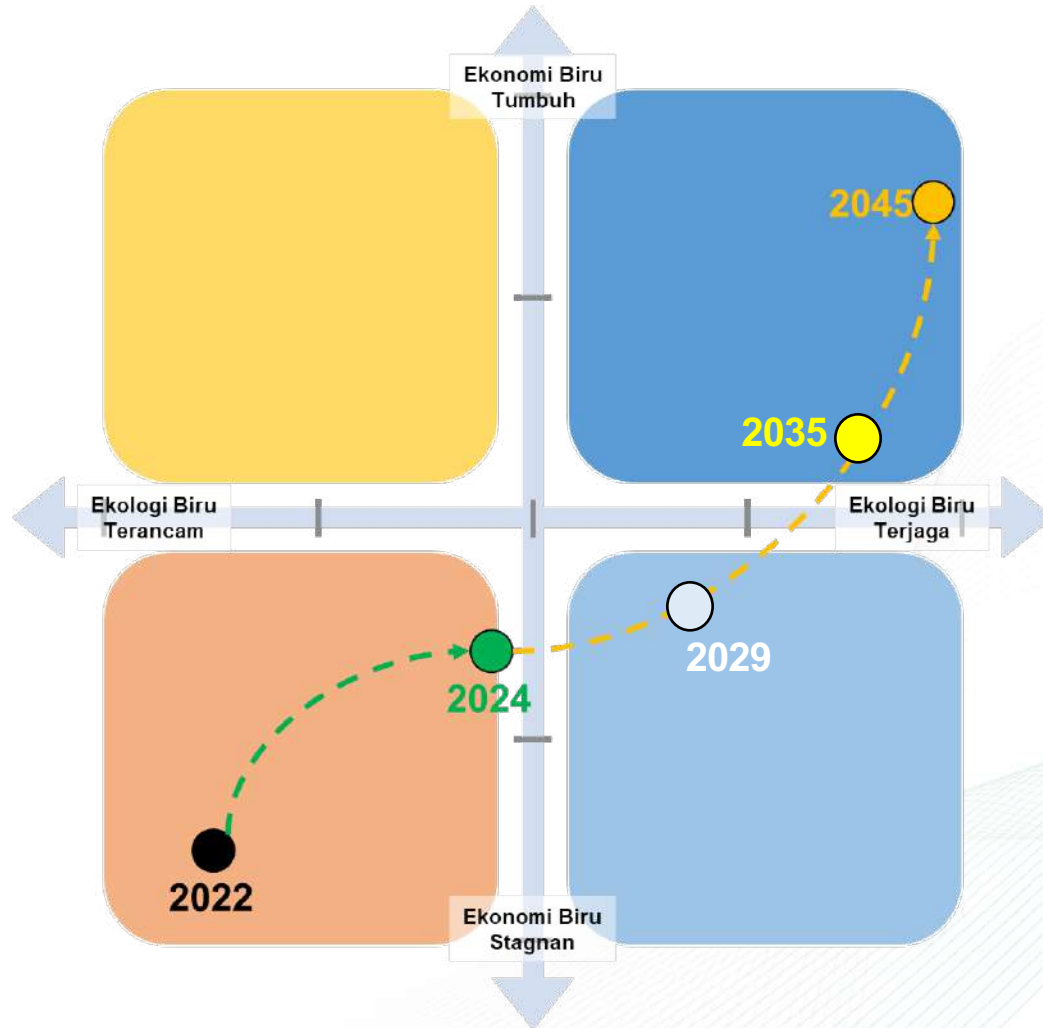


POSISI DAN PROYEKSI EKONOMI BIRU

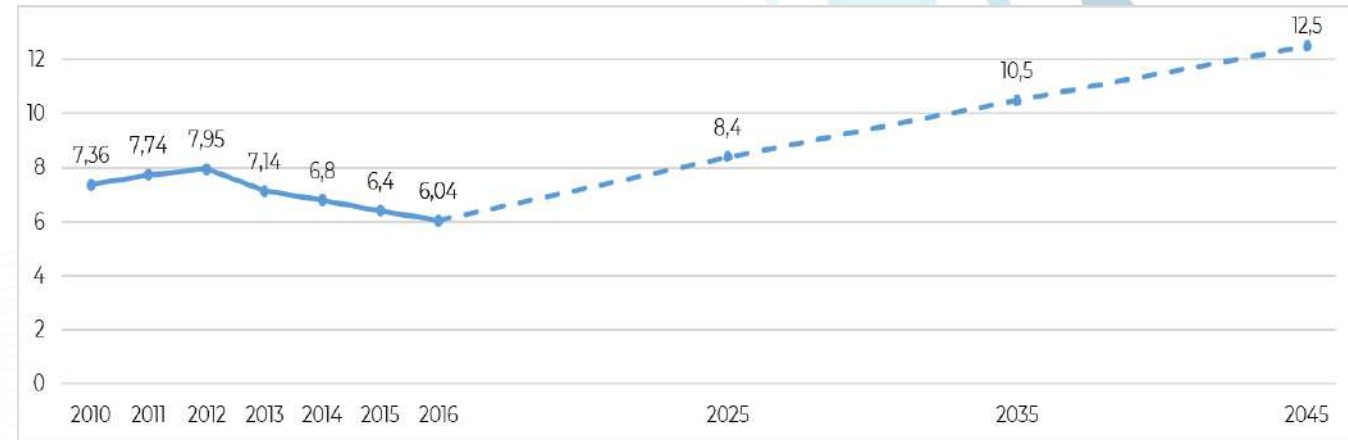
SKENARIO PERENCANAAN EKONOMI BIRU



POSISI DAN PROYEKSI EKONOMI BIRU



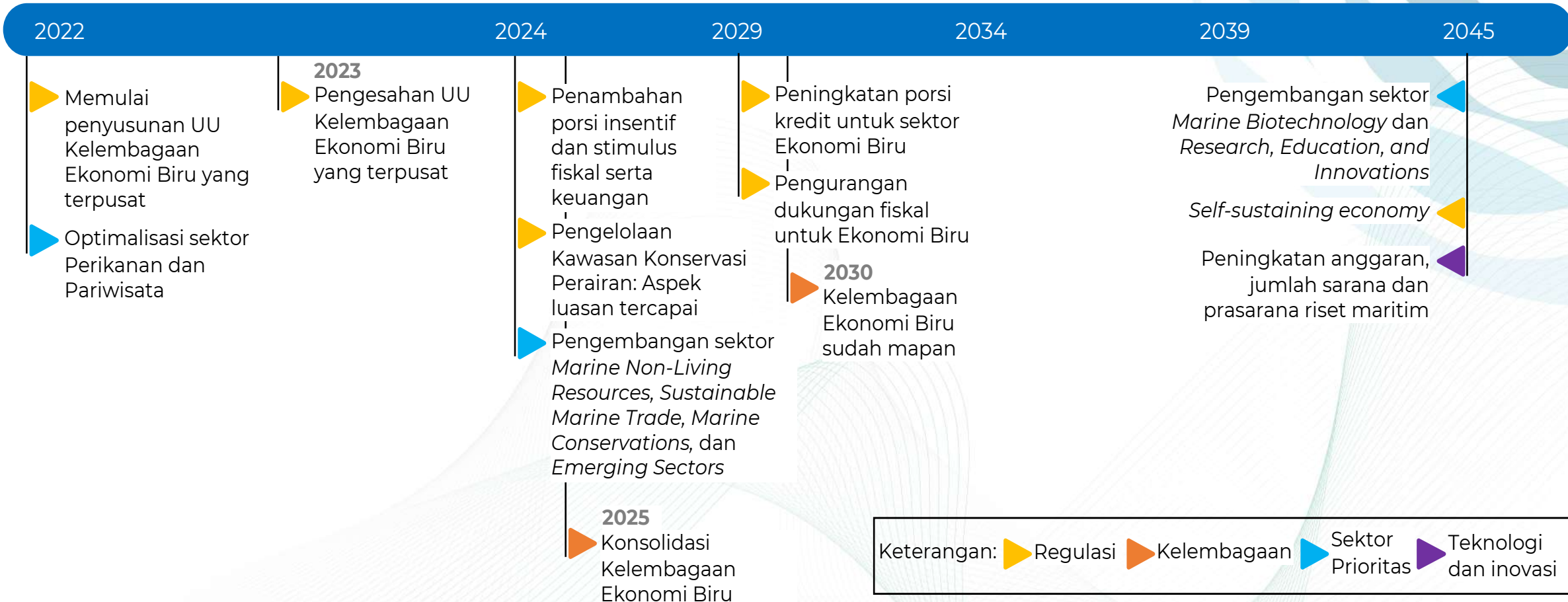
Skenario Perencanaan Ekonomi Biru di 2022, 2024, 2029, 2035 dan 2045



Proyeksi Kontribusi Sektor Maritim terhadap PDB menurut BAPPENAS (dlm %)

No.	Variabel	Indikator	Posisi 2022	Proyeksi 2024	Proyeksi 2045
1	Regulasi	Pertumbuhan Investasi Ekonomi Biru	Stagnan	Moderat	Tinggi
		Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Rendah	Moderat	Ideal
		Insentif dan Stimulus Fiskal serta Keuangan	Rendah	Lepas Landas	Self-sustaining economy
2	Kelembagaan	Struktur Kelembagaan	Tersebar	Terpusat	Mapan
		Fungsi Kelembagaan	Rendah	Moderat	Efektif
3	Sektor Prioritas	Potensi dan Kontribusi Ekonomi	<i>Business as Usual</i>	Optimalisasi	Diversifikasi
		Realisasi dan Kebutuhan Investasi	<i>Business as Usual</i>	Optimalisasi	Diversifikasi
		<i>Multiplier Effect</i>	Rendah	Moderat	Tinggi
4	Teknologi dan Inovasi	Anggaran Riset Maritim	Rendah	Rendah	Tinggi
		Sarana dan Prasarana Riset	Sedikit	Terbatas	Masif

LINI MASA SARAN KEBIJAKAN





TERIMA KASIH